



# RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

## *INSPEKTORAT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR*



*SAMARINDA 2019*

## DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	40
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
	3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB IV	PENUTUP	60

### LAMPIRAN :

- Agenda Kinerja OPD Tahun 2019
- Analisis Gambar Tupoksi OPD
- Lampiran – Lampiran



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik ( *Strategic plan*), Rencana



Kinerja (*Performance Plan*) serta laporan pertanggung jawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kinerja Ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi



Kalimantan Timur yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2019.

## **2.2. Landasan Hukum**

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);



10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Permedagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.



16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

### **2.3. Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur. Pernyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 ini telah





memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah.
- b. Kebutuhan daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
- i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur .
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.



#### **1.4. Sistematikan Penulisan**

Dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan ini diawali dari :

**Bab I   Pendahuluan**

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**Bab II   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun  
Lalu.**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat  
Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan  
Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Bab V Penutup**





## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700/1405-Khusus/Itprov/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dengan hasil Evaluasi sebesar **73,59** atau predikat “ **BB** “ ( **Sangat Baik** ), sebagaimana hasil evaluasi berikut ini :



No.	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2017	Nilai 2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,36	26,36
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,06	20,31
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,42	10,57
4.	Evaluasi Kinerja	10	8,17	8,17
5.	Capaian Kinerja	20	11,34	9,98
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>75,35</b>	<b>75,39</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB (Sangat Baik)</b>	<b>BB (Sangat Baik)</b>

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar 91,30% yang merupakan pencapaian atas pelaksanaan renja tahun dan capaian Renstra perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%		Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	80	80	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian	%			Triwulan I	-	-



		Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.			Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	97	96.82	99,81
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor		Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	75	62.69	83,95
					Triwulan IV	-	-	-
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	75	0	0
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80	55.56	69.45
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	100	105.26
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	10	10	100
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	2	0	200
		SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	OPD		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-



					Triwulan IV	2	1	50
4.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	45	36	80.00
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	95	100
		Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	100	105.26
6.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	90	76	84.44

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 untuk menunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur setelah perubahan adalah sebesar Rp. 17.604.555.408,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.638.955.408,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.994.722.549,00 ( 93,32%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.965.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.





7.955.715.982,00 ( 99,88%). Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2018 setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target / Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.142.640.000</b>	<b>1.136.292.582</b>	<b>99,44</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.142.640.000	1.136.292.582	99,44	Fisik 100%
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>141.100.000</b>	<b>140.950.583</b>	<b>99,89</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	141.100.000	140.950.583	99,89	Fisik 100%
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.378.500.000</b>	<b>1.379.149.117</b>	<b>99,97</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	543.000.000	542.854.300	99,97	Fisik 100%
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	835.500.000	835.294.817	99,98	Fisik 100%
4.	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</b>	<b>78.000.000</b>	<b>77.920.700</b>	<b>99,90</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	78.000.000	77.920.700	99,90	Fisik 100%
5.	<b>Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan</b>	<b>2.649.500.000</b>	<b>2.649.291.650</b>	<b>99,99</b>	<b>Fisik 100%</b>



a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	400.000.000	399.802.500	99,95	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Kinerja SKPD	2.249.500.000	2.249.489.150	100,00	Fisik 100%
<b>6.</b>	<b>Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>611.500.000</b>	<b>611.480.500</b>	<b>100,00</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	611.500.000	611.480.500	100,00	Fisik 100%
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</b>	<b>136.500.000</b>	<b>135.459.100</b>	<b>99,24</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	136.500.000	135.459.100	99,24	Fisik 100%
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>63.860.000</b>	<b>63.860.000</b>	<b>100</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	63.860.000	63.860.000	100	Fisik 100%
<b>9.</b>	<b>Program Pengembangan Zona Integritas</b>	<b>103.300.000</b>	<b>102.912.100</b>	<b>99,62</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Penerapan Zona Integritas pada SKPD	103.300.000	102.912.100	99,62	Fisik 100%
<b>10.</b>	<b>Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN</b>	<b>1.660.700.000</b>	<b>1.659.399.650</b>	<b>99,92</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	182.000.000	181.648.800	99,81	Fisik 100%
b.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1.478.700.000	1.477.750.850	99,94	Fisik 100%

Berdasarkan analisa permasalahan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan sedangkan beberapa penyebab tidak tercapainya target sebagaimana yang telah direncanakan disebabkan adanya tugas-tugas lainnya dibidang pengawasan



yang tidak sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah dibuat, adanya kebijakan terkait dengan masalah pembayaran honorarium kegiatan dan pembayaran biaya kontribusi . Diharapkan pada tahun-tahun mendatang agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Sedangkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dapat dilihat lampiran 1.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah , baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota dan dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memfasilitasi pelaksanaan pengawasan baik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Timur. Aspek strategis organisasi yang akan capai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dalam rangka pencapaian Opini WTP.
2. Laporan Keuangan Pemprov dan OPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan.
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan APIP maupun Eksternal.
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peranserta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance.
7. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN sesuai dengan rencana aksi daerah PPK.

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.



2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.
5. Rencana perubahan atas PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berdampak pada eselonisasi Inspektorat Provinsi yang setara dengan Eselon II.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 53 Tahun 2016, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;



2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

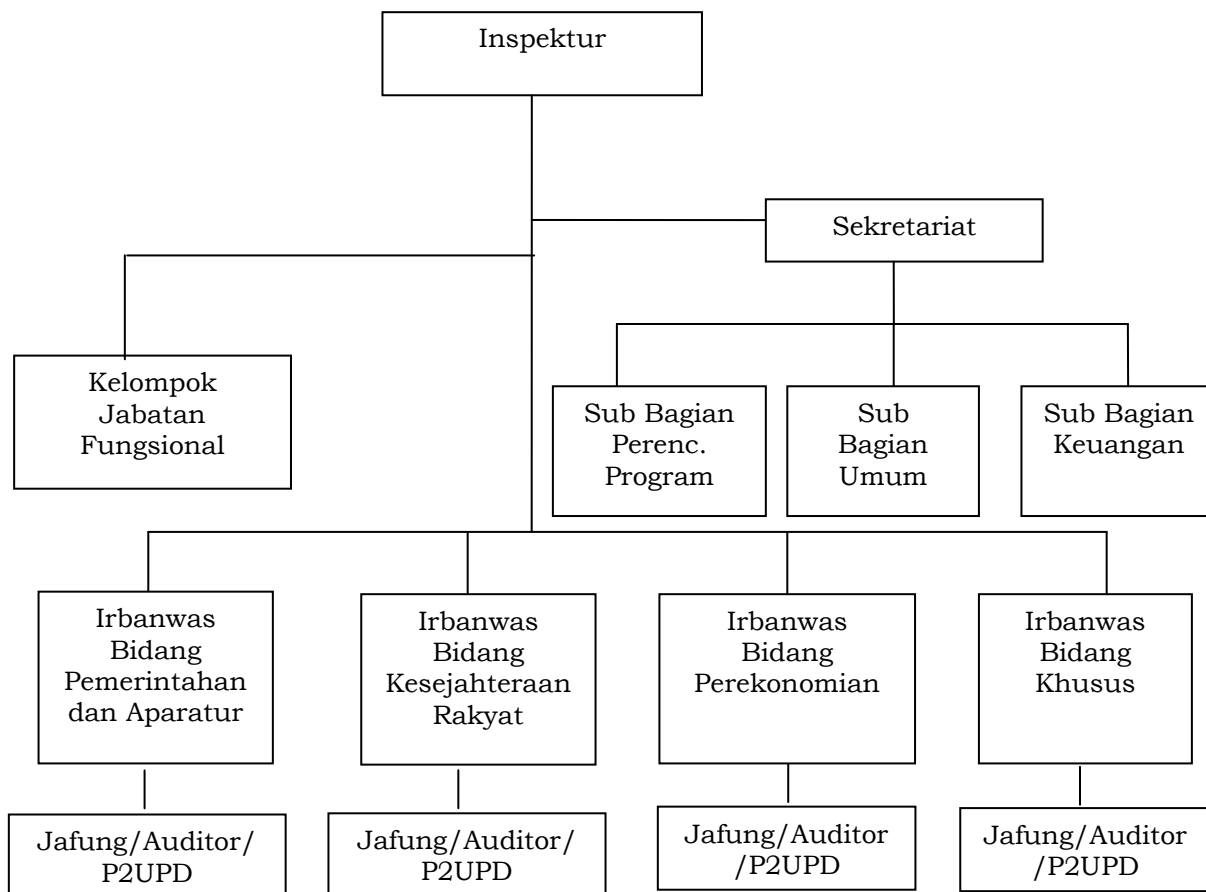
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan Program.
  2. Subbagian Umum.
  3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan



- g. Kelompok Jabatan Fungsional ( Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur





Sipil Negera yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang



baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 87 orang yang terdiri dari 61 orang PNS/ASN dan 26 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 87 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan				
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Urbanbidwas	4	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-



<b>Kasubbag</b>	1	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
<b>Fungsional Tertentu</b>	22	14	5	31	-	-	3	33	-	-	-	-
<b>Fungsional Umum</b>	10	6	-	9	6	1	-	3	-	12	1	-
<b>Jumlah PNS</b>	38	23	9	45	6	1	7	41	-	12	1	-
<b>Jumlah Honor/PTT</b>	14	12	-	-	-	-	-	16	2	8	-	-
<b>Jumlah PNS dan PTT</b>	52	35	9	45	6	1	7	57	2	20	1	-

Pada tahun anggaran 2019 ini, dimana telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang baru untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2019 yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Anggaran Kegiatan Langsung (RAKL) dan dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan telah dicapai capaian kinerjanya. Diharapkan dukungan program dan kegiatan pada tahun 2019 dalam pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan dari target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat analisis kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu terdapat 6 sasaran dengan 14 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 6 sasaran dan 14



indikator telah dicapai sebesar 91,30%. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan



yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta selalu melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	%	80	80	100

Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 80% dan telah dicapai sebesar 80% dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD telah dicapai sesuai target yang ditetapkan, dimana Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi SAP dan penyajiannya sudah sesuai dengan standar / kaedah-kaedah dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), meskipun kesesuaiannya baru mencapai 80% dari standar penyajian laporan keuangan yang sudah ditetapkan, karena pada saat dilakukan reviu atas Laporan Keuangan tersebut masih ditemukan yaitu : (1) masih terdapat salah penyajian/klasifikasi asset didalam Neraca, (2) terdapat kelebihan didalam penyajian/overstated di Neraca, (3) akun yang belum disajikan dalam Neraca, (4) terdapat koreksi atas pemusnahan/ penghapusan asset lain-lain, (5) terdapat perbedaan nilai persediaan antara Sistem Informasi Kaltim untuk asset Persediaan (SIKAP) dengan Nilai yang disajikan di Aplikasi SIMDA Keuangan)



dan (6) masih terdapat kejadian yang belum jelas di Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhadap hal-hal tersebut diatas akan terus dilakukan perbaikan – perbaikan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	97	96.82	99,81

Pencapaian Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 97% dan telah dicapai sebesar 96,82% dengan capaian sebesar 99,81%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerja baru sebesar 96,82% dari target yang ditetapkan sebesar 97,00%. Pencapaian ini didasarkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA. Namun dari capaian tersebut memang belum sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini berdasarkan atas hasil pemeriksaan atas kinerja SPKD yang telah dilaksanakan yaitu dimana masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan dan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang mendukung



pencapaian penetapan kinerjanya belum dilaksanakan secara maksimal dan masih terdapat sisa anggaran, keterbatasan waktu dan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	75	62.69	83.95

Pencapaian skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja SKPD / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 75 skor dan telah dicapai 62.69 skor dengan capaian sebesar 83,95%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari segi capaian belum tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja SKPD tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi klinerja serta pencapaian kinerja masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya.





No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	72	51,82	71,97

Pencapaian skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja Kab/Kota / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 72 skor dan telah dicapai 51,82 skor dengan capaian sebesar 71,97%, namun capaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemda Kab/Kota dilaksanakan pada 4 Kab/Kota, yaitu : Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kab/Kota telah akan melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab/Kota yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya. Sedangkan untuk target capaian tahun 2018 nilainya belum dapat disajikan, karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB.



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai <b>Sangat Tinggi</b>	%	80	55,56	69,45

Pencapaian persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi dari target 80% dan telah dicapai 55,56 % dengan capaian sebesar 69,45%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu tidak dievaluasi. Dari hasil evaluasi terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung



dan kooordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

**Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	95	100	105,26

Pencapaian persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 95% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 105,26%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan bahwa semua kasus / pengaduan yang masuk sudah ditangani atau sudah dilakukan pemeriksaan. Tertangani dan dilakukannya pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat yang masuk disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta pada tahun 2018 terjadi perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin	Kasus	10	10	100



	Pegawai				
--	---------	--	--	--	--

Pencapaian menurunnya kasus pelanggaran disiplin pegawai dari target 10 kasus dan telah dicapai 10 kasus dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun dari target penurunan kasus pelanggaran disiplin hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kasus pelanggaran disiplin oleh pegawai/PNS yang disebabkan antara lain kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera serta lemahnya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/PNS yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/PNS telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/PNS dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS serta meningkatkan kesadaran PNS/ASN atas pentingnya disiplin melalui sosialisasi dll.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2	0	200



Pencapaian menurunnya kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari target 2 kasus dan telah dicapai 0 kasus dengan capaian sebesar 200%, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN, hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pencanangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpungli, Kerjasama antara APIP dan APH, adanya Tim TP4D, meningkatkan kontrol internal sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan meningkatkan peranan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga pengaduan/laporan/kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	OPD	2	1	50,00



Pencapaian SKPD/OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 2 OPD dan telah dicapai 1 OPD dengan capaian sebesar 50,00%, hal ini menunjukkan bahwa capaian ini belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 ini ditetapkan 2 OPD yang menjadi Pilot Project sebagai ZI Menuju WBK/WBBM, yaitu RSUD Abdul Wahan Sjahranie dan RSDJ Atma Husada Mahakam. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSDJ Atma Husada Mahakam, sedangkan RSUD Abdul Wahab Sjahranie belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap RSDJ Atma Husada Mahakam sudah diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK dan sampai saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Tim Eksternal sedangkan hasilnya belum dapat disampaikan.

**Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45	36	80,00

Pencapaian Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 45 orang dan telah dicapai 36 Orang dengan capaian sebesar 80,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun



2018, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 36 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan ( Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

**Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	%	95	95	100

Pencapaian Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya dari



target 95% dan telah dicapai 95 % dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian cakupan pengawasan ini didasarkan atas SKPD/OPD yang akan dilakukan pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari 46 SKPD/OPD yang terdiri dari 38 OPD dan 9 Biro dan belum semua OPD/SKPD dapat dilakukan pengawasan/pemeriksaan dari 46 hanya 44 OPD/SKPD yang diperiksa atau 95,65 % dan ada 2 OPD/SKPD yang tidak diperiksa yaitu Badan Kesbang Pol dan Biro Humas Setda Prov. Kaltim. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Aparatur Pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adanya kegiatan-kegiatan di luar pengawasan yang harus dilaksanakan dan keterbatasan anggaran pengawasan serta keterbatasan waktu pengawasan. Dalam rangka untuk mencapai cakupan pengawasan tersebut, maka pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan didasarkan atas skala prioritas dan penilaian risiko yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan, waktu pengawasan serta meningkatkan dukungan anggaran pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	95	100	105.26





Pencapaian Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Program Pengawasan dari target 95% dan telah dicapai 100%. Hal ini menunjukkan telah dicapai, bahkan diatas target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan atas Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang mencakup 16 kegiatan pengawasan, antara lain Pemeriksaan Kinerja, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD, Reviu LKjIP Pemprov, Evaluasi SAKIP/LKjIP OPD dan Kab/Kota, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Monev Hibah/Bansos, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Serentak/ Pemeriksaan atas PBJ OPD, Pemberian Advis/Saran/Pendapat dan Kegiatan Pengawasan lainnya seperti Penerapan ZI menuju WBK, Unit Saber Pungli, PMPRB dan Aksi-PPK Daerah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dengan dukungan SDM dan anggaran yang tersedia.

**Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	90	76	80,00

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari target 90% dan telah dicapai 76% dengan capaian sebesar 80,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang



ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan meskipun tidak sebesar apa yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

Secara garis besar capai kinerja pelayanan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Namun sampai dengan sampai saat ini belum ada kajian terhadap Standar Pelayanan Prima (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dapat dilihat pada lampiran 2.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.**

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obrik.
- c. Prioritas tahun 2019 – 2023 lingkup Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



- d. Masih terbatasnya tenaga yang profesional, khususnya dibidang pengawasan terkait dengan jabatan fungsional auditor.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut.
- c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi dibidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan meningkatkan cakupan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- d. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor / aparatur fungsional pengawasan pada pendidikan dan pelatihan



teknis sesuai bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun 2019 – 2023 dan RKPD Perubahan Tahun 2019. Namun dari hasil reuiu yang dilaksanakan kadang-kadang belum semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Awal Perubahan RKPD yang telah ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran yang terdapat berbeda, hal ini didasarkan atas adanya kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya hasil reuiu terhadap RKPD Perubahan Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 3.





## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 yang juga dilaksanakan oleh seluruh



Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainnya seperti Kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi , Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini baru ada 1 yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK yaitu pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan serta pada tahun 2019 akan diusulkan 2 OPD sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang





telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 s.d. 2023, yaitu :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam rancangan Renja perubahan ini adalah merupakan enjabar dan arivisi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 s.d. 2023 yang dijabarkan dalam tujuan dan



sasaran serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Program dan kegiatan adalah merupakan kumpulan kegiatannya yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 telah ditetapkan program sebanyak 10 program dengan 14 kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2023, yaitu :

**a. Program :**

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 terdiri dari program prioritas dan penunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.



5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.
7. Program Pencegahan KKN.
8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP
9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.

**b. Kegiatan :**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a.

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saran dan Prasarana.

- b.

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Saran dan Prasarana.



3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi

6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Review Atas Laporan Keuangan.

7. Program Pencegahan KKN

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pemeriksaan Khusus/Investigatif.
- b. Pembangunan Zona Integritas.
- c. Aksi Pencegahan Korupsi



- d. Pengendalian Gratifikasi.
  - e. Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan.
  - f. Monev LHKPN dan LHKASN
  - g. Koordinasi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH.
  - h. Operasional SABERPUNGLI.
  - i. Survey Penilaian Integritas.
  - j. Pembangunan Budaya Integritas.
8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Pelatihan di Kantor Sendiri.
  - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan.
  - c. Peningkatan Level Kapabilitas APIP.
9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Pemeriksaan Operasional OPD
  - b. Pemeriksaan / Audit Kinerja OPD
  - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
  - d. Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan.
  - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
  - f. Pemberian Advise dan Konsultasi.



- g. PenilaianMandiriReformasiBirokrasi.
- 10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota  
Kegiatan yang dilaksanakan :
  - a. Evaluasi EKPPD Kab/Kota
  - b. Evaluasi SAKIP Kab/Kota.
  - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 lokasi penyebaran untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebesar Rp. 27.306.285.000,00 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.263.445.000,00
- Belanja Langsung :Rp.16.042.840.000,00

Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah dibuat, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat guna mewujudkan visi dan misi serta tugas lain yang menjadi



beban kerja guna menjadi Kalimantan Timur yang lebih baik dalam rangka good government dan good governance.

Sedangkan pagu indikatif pada rencana kerja perubahan untuk masing-masing program dan kegiatan pada tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai Rancangan Perubahan Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut

:

No.	Program / Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif
I	Belanja Tidak Langsung	1	tahun	11.263.445.000
II	Belanja Langsung	1	tahun	16.042.840.000
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	tahun	1.516.600.000
	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	bulan	12	1.516.600.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	unit	58	1.883.800.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	48	1.535.100.000
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	10	348.700.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Keg/Org	60	1,769.700.000
	a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kegiatan	60	862.200.000
	b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	60	907.500.000
4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	7	410.100.000
	a. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	7	410.100.000
5.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Orang	60	2.767.000.000
	a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	Kegiatan	12	2.767.000.000
6.	Program Pengembangan Zona Integritas	2	OPD	144.900.000
	a. Penerapan Zona Integritas pada SKPD	2	OPD	144.900.000



7.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persen	90	189.300.000
	a. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Kegiatan	4	189.300.000
8.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	37	1.597.510.000
	a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Laporan	37	1.597.510.000
9.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Laporan	63	3.441.625.000
	a. Reviu Atas Laporan Keuangan	Laporan	17	226.500.000
	b. Pemeriksaan Kinerja SKPD	Laporan	46	3.215.125.000
10.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Kegiatan	4	2.322.305.000
	a. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan	20	311.380.000
	b. Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Kegiatan	4	2.010.925.000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1	tahun	11.263.445.000
	BELANJA LANGSUNG	1	tahun	16.042.840.000
	TOTAL	1	tahun	27.306.285.000

Untuk rumusan rencana kerja pada perubahan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 4.





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 terdapat 14 program, yaitu 10 program prioritas dan 4 program penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan 22 kegiatan. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah dibuat Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 yang memuat program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam RKA dan DPA Perubahan Tahun 2019 yang akan di tuangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2019 ini, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan melaksanakan 10 program dengan 22 kegiatan yang dituangkan dalam agenda Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebagaimana yang telah dibuat dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja yang dituangkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) beserta pendanaan yang dibutuhkan sebesar Rp. 27.306.285.000,- yang terdiri dari :



- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.263.445.000,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 16.042.840.000,-

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terhadap administrasi perkantoran pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.516.600.000,0 dengan target capaian 12 bulan / 1 tahun.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan :
  - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dilaksanakan dalam rangka meningkat sarana dan prasaran pengawasan yang dimiliki dan dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.535.100.000,- dan target capaian 48 unit.
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemeliharaan terhadap peralatan dan kelengkapan sarana serta prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019



dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.700.000,- dan target capaian 10 unit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan :

a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara lembaga daerah khususnya dalam rangka kegiatan pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 862.200.000,- dan target capaian 60 kegiatan.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Workshop. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 907.500.000,- dan target capaian 60 orang.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, yang akan dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas penyelenggaraan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini menyangkut pencapaian kinerja, program dan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember



2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.100.000,- dan target capaian 7 dokumen.

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui peningkatan kapabilitas dengan melaksanakan Pelatihan, Diklat, Bimtek dan Workshop/Seminar. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret, Juni dan September 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.767.000.000,- dan target capaian 60 orang / 12 kegiatan.
6. Program Pengembangan Zona Integritas, yang akan dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi atas OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project Zona Integritas Menuju WBK untuk selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut akan disampaikan ke Kementerian PAN-RB sebagai OPD ZI Menuju WBK. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.900.000,- dan target capaian 2 Perangkat Daerah.
7. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui tingkat penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PD / Obrik/ Entitas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan temuan dan rekomendasinya. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam



setahun, yaitu pada triwulan I, II, III dan IV pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.300.000,- dan target capaian 90%.

8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, yang akan dilaksanakan adalah melakukan kegiatan evaluasi atas LKjIP OPD dan LKjIP Pemda Kab/Kota yang akan dilaksanakan pada bulan April, Maret dan September 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.597.510.000,- dan target capaian 37 Laporan.
9. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan :
  - a. Reviu Atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja OPD. Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi dan OPD, hal ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian Laporan Keuangan yang sudah dibuat Pemerintah Provinsi dan OPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada bulan Pebruari dan Maret 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.500.000,- dan target capaian 17 Laporan.
  - b. Pemeriksaan Kinerja OPD dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut. Kegiatan ini meliputi Pemeriksaan atas tugas pokok dan fungsi OPD, Aspek Kepegawaian, Aspek Keuangan, Aspek Barang Milik



Daerah / Asset yang dimiliki OPD dan Aspek Kebijakan yang dibuat OPD, Sistem Pengendalian Intern dan Asas 3 E ( efektif, efisien dan ekonomis). Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, maka akan berdampak pada cakupan tugas-tugas pengawasan terutama terhadap audit universal terkait dengan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan, dan pengadaan barang/jasa yang telah diadakan oleh OPD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan., audit terhadap sekolah-sekolah menengah atas/kejuruaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli dan Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.215.125.000,- dan target capaian 46 laporan.

10. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan :
  - a. Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pencegahan, pemberantasan KKN yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat agar segera ditangani dengan melakukan pengecekan atas kebenaran atas pengaduan tersebut.. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.311.380.000,- dan target capaian 20 pengaduan.
  - b. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN, yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan integritas, pelaksanaan aksi daerah PPK,



antara APIP dan APH dan Saberpungli dimana kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.010.925.000,- dan target capaian 4 kegiatan.

Agenda kerja dan pendanaan yang dibuat tersebut diatas didasarkan atas program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2019. Demikian agenda kerja dan pendanaan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini dibuat sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja, RKA Perubahan dan DPA Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2019.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2019 yang telah disusun dapat diimplementasikan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, RKPD Perubahan Tahun 2019 dan dalam RPJMD Kalimantan Timur 2019 – 2023 serta dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Samarinda, 16 Juli 2019

a.n. INSPEKTUR  
SEKRETARIS,

**Hj. Noryani Sorayalita, SE.MMT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651219 198601 2 001





## LAMPIRAN - LAMPIRAN

## REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018

INSTANSI : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Prog/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	<b>Urusan Pilihan</b>										
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	60 bulan	100%	4000 surat	4000 surat	100%	5000 surat	-	-	Masih dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan
B.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	1 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah peralatan kantor Gedung Kantor yang tersedia	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%	10 Unit	-	-	
C.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda</b>										
	1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda Jumlah korodisasi dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan	180 Kegiatan	100%	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100%	36 Kegiatan	-	-	
	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatanm peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	15 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	-	-	
D.	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>										
	1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat	35 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	-	-	
E.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>										
	1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang dilaksanakan	40 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	-	-	
F.	<b>Program Pengembangan Zona Integritas</b>										
	1 Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Terbinaannya Zona Integritas pada OPD Jumlah SKPD yang akan menerapkan ZI menuju WBK/ WBBM	5 SKPD	100%	2 SKPD	1 SKPD	50%	2 SKPD	-	-	
G.	<b>Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN</b>										
	1 Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan KKN Jumlah pengaduan yang ditangani	100 Kasus	100%	20 Kasus	18 Kasus	90%	20 Kasus	-	-	Masih dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan
	2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	50 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%	10 Laporan	-	-	
	3 Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	20 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	-	-	
H.	<b>Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan</b>										
	1 Reviua Atas Laporan Keuangan	Terjaminnya Laporan Keuangan sesuai SAP Jumlah Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang di reviu	45 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	2 Pemeriksaan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang diperiksa kinerjanya	48 SKPD	100%	33 SKPD	33 SKPD	100%	48 OPD	-	-	
	3 Pemeriksaan Serentak/Pemeriksaan Hasil Pengadaan BJ	Jumlah kegiatan fisik pada SKPD yang diperiksa	39 SKPD	100%	22 SKPD	22 SKPD	100%	48 OPD	-	-	
I.	<b>Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>										
	1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang dievaluasi	43 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%	37 Laporan	-	-	
	2 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	4 Kab/Kota	100%	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100%	4 Kab/Kota	-	-	
J.	<b>Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</b>										
	1 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	100%	100%	90%	82%	91,11%	95%	-	-	
K.	<b>Program Peningkatan Koodinasi dan Sinergitas Pengawasan</b>										
	1 Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pengawasan Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan APIP dan Eksternal	10 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	0%	-	-	
L.	<b>Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah</b>										
	1 Evaluasi LPPD Kab/Kota	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah Jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi	10 Kab/Kota	100%	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	-	-	
M.	<b>Program Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Di lingkungan Pemprov. Kaltim</b>										Tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran
	1 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terselenggaranya Pengendalian Internal Pemerintah dilingkungan Pemprov. Kaltim Jumlah OPD yang menerapkan SPIP	5 OPD	100%	0%	0%	0%	-	-	-	
	2 Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah kegiatan evaluasi SPIP yang dilaksanakan	5 Kegiatan	100%	0%	0%	0%	-	-	-	
N.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan</b>										
	1 Pengawasan Urusan Provinsi	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan Jumlah kegiatan pengawasan urusan provinsi yang dilaksanakan	7 Kegiatan	100%	0%	0%	100%	-	-	-	

Lampiran : 2

## KINERJA PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 2013 - 2018 )

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Opini atas laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
2	Persentase laporan keuangan pemprov kaltim sesuai SAP	%	80	40	50	40	40	100	50	50	100	60	60	100	70	70	100	70	70	100
3	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP	%	80	40	50	40	40	100	50	50	100	60	60	100	70	70	100	70	70	100
4	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai tupoksi dan PK	%	97	85	88	85	85	100	90	90	100	93	93	100	95	94,65	100	95	95	100
5	Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	42	42	100	60	57,38	95,63	65	59,45	91,46	70	70	100	75	61,89	85,96	80	80	100
6	Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota	Skor	80	60	75	60	55,56	92,60	65	0	0	70	70	100	75	57,8	8-28	80	80	100
7	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi	%	20	20	100	30	55,56	185,20	50	55,56	111	60	60	100	60	55,56	92,6	80	80	100
8	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	80	80	80	80	100	85	100	117	90	90	100	95	100	105,26	100	100	100
9	Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov	Kasus	5	5	100	5	0	100	4	0	100	3	0	200	2	0	200	0	0	0
10	Jumlah pelanggaran disiplin pegawai	Kasus	5	3	60	20	6	30,00	18	2	11,11	15	15	100	10	10	100	5	5	100
11	Penerapan ZI Menuju WBK/WBBM pada SKPD	SKPD	0	0	0	1	1	100,00	2	2	100	3	3	100	2	1	50	5	5	100
12	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	%	95	80	84	75	75	100	80	75	93,75	85	85	100	90	82	86,32	95	95	100
13	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	52	34	65	35	31	89	40	32	80,00	45	45	100	45	39	82,98	52	52	100
14	Cakupan Pengawasan	%	80	25	31	25	25	100	50	40,38	80,76	80	80	100	95	71	74,74	100	100	100
15	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	%	90	85	94	60	78,57	130,95	75	88,24	117,65	80	80	100	85	100	117,65	90	90	100
16	Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD	SKPD	1	1	100	2	2	100	2	2	100	3	0	0	0	0	0	4	4	100
17	Persentase laporan hasil pengawasan yang terbit tepat waktu	%	100	75	75	10	10	100	30	50	166,67	50	0	0	0	0	0	100	100	100

REVIEW TERHADAP RKPD PERUBAHAN TAHUN 2019

INSTANSI : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pilihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda,	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 Bulan	16.042.840.000 1.516.600.000	Urusan Pilihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda,	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 Bulan	##### 1.516.600.000 1.516.600.000	Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, secara program dan kegiatan serta pendanaan sesuai usulan, tidak terdapat perbedaan, dan sudah sama/sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2019. Namun apabila adanya pengurangan pagu anggaran akan berdampak pada tidak tercapainya program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 1 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda Samarinda	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan Jumlah peralatan kantor Gedung Kantor yang tersedia	48 unit 10 unit	1.883.800.000 1.535.100.000 348.700.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 1 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda Samarinda	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan Jumlah peralatan kantor Gedung Kantor yang tersedia	48 unit 10 unit	1.883.800.000 1.535.100.000 348.700.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov.Kab/Kota Luar Prov Kab/Kota/Luar Prov.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda Jumlah korodinasi dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan Jumlah kegiatanm peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	60 Kegiatan 60 orang	1.769.700.000 862.200.000 907.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov.Kab/Kota Luar Prov Kab/Kota/Luar Prov.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda Jumlah korodinasi dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan Jumlah kegiatanm peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	60 Kegiatan 60 orang	1.769.700.000 862.200.000 907.500.000	
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Samarinda	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat	7 Dokumen	410.100.000 410.100.000	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Samarinda	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat	7 Dokumen	410.100.000 410.100.000	
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Prov. Kab/Kota Luar Prov	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan yang dilaksanakan	60 orang	2.767.000.000 2.767.000.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Prov. Kab/Kota Luar Prov	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan yang dilaksanakan	60 orang	2.767.000.000 2.767.000.000	
6	Program Pengembangan Zona Integritas 1 Penerapan Zona Intergritas pada SKPD	Samarinda	Terbinaannya Zona Integritas pada OPD Jumlah SKPD yang akan menerapkan ZI menuju WBK/ WBBM	2 OPD	144.900.000 144.900.000	Program Pengembangan Zona Integritas 1 Penerapan Zona Intergritas pada SKPD	Samarinda	Terbinaannya Zona Integritas pada OPD Jumlah SKPD yang akan menerapkan ZI menuju WBK/ WBBM	2 OPD	144.900.000 144.900.000	
7	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN 1 Penanganan Pengaduan Masyarakat 2 Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota/ Luar Prov	Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan KKN Jumlah pengaduan yang ditangani Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	20 Kasus 4 Kegiatan	2.322.305.000 311.380.000 2.010.925.000	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN 1 Penanganan Pengaduan Masyarakat 2 Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota/ Luar Prov	Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan KKN Jumlah pengaduan yang ditangani Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	20 Kasus 4 Kegiatan	2.322.305.000 311.380.000 2.010.925.000	
8	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan 1 Reviu Atas Laporan Keuangan 2 Pemeriksaan Kinerja SKPD	Samarinda Samarinda	Terjaminnya Laporan Keuangan sesuai SAP Jumlah Laporan Keuangan OPD yang direviu Jumlah OPD yang diperiksa kinerjanya	17 Laporan 46 Laporan	3.441.625.000 226.500.000 3.215.125.000	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan 1 Reviu Atas Laporan Keuangan 2 Pemeriksaan Kinerja SKPD	Samarinda Samarinda	Terjaminnya Laporan Keuangan sesuai SAP Jumlah Laporan Keuangan OPD yang direviu Jumlah OPD yang diperiksa kinerjanya	17 Laporan 46 Laporan	3.441.625.000 226.500.000 3.215.125.000	
9	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Prov/Kab/Kota	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang dievaluasi	37 Laporan	1.597.510.000 1.597.510.000	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Prov/Kab/Kota	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang dievaluasi	37 Laporan	1.597.510.000 1.597.510.000	
10	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Prov/Kab/Kota	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Jumlah kegiatan evaluasi berkala TLHP yang dilaksanakan	4 Kegiatan	189.300.000 189.300.000	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Prov/Kab/Kota	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Jumlah kegiatan evaluasi berkala TLHP yang dilaksanakan	4 Kegiatan	189.300.000 189.300.000	
			JUMLAH		16.042.840.000			JUMLAH		#####	

## RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Urusan Pilihan</b>				<b>16.042.840.000</b>				
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Samarinda,	12 Bulan	<b>1.516.600.000</b> 1.516.600.000	APBD	Usulan Pagu Anggaran Indikatif ini berdasarkan pada PP 12 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.	100%	<b>1.668.260.000</b> 1.668.260.000
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 1 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan Jumlah peralatan kantor Gedung Kantor yang tersedia	Samarinda Samarinda	48 unit 10 unit	<b>1.883.800.000</b> 1.535.100.000 348.700.000	APBD		100%	<b>933.570.000</b> 550.000.000 383.570.000
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda</b> 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda  2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov.Kab/Kota Luar Prov Kab/Kota/Luar Prov.	60 Kegiatan 60 orang	<b>1.769.700.000</b> 862.200.000 907.500.000	APBD APBD		100%	<b>4.448.420.000</b> 948.420.000 3.500.000.000
4	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat	Samarinda	7 Dokumen	<b>410.100.000</b> 410.100.000	APBD		100%	<b>451.110.000</b> 451.110.000
5	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b> 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan yang dilaksanakan	Prov, Kab/Kota Luar Prov	60 orang	<b>2.767.000.000</b> 2.767.000.000	APBD		100%	<b>3.043.700.000</b> 3.043.700.000
6	<b>Program Pengembangan Zona Integritas</b> 1 Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Terbinaannya Zona Integritas pada OPD Jumlah SKPD yang akan menerapkan ZI menuju WBK/ WBBM	Samarinda	2 OPD	<b>144.900.000</b> 144.900.000	APBD		100%	<b>159.390.000</b> 159.390.000
7	<b>Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN</b> 1 Penanganan Pengaduan Masyarakat 2 Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan KKN Jumlah pengaduan yang ditangani Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota/Luar Prov	20 Kasus 4 Kegiatan	<b>2.322.305.000</b> 311.380.000 2.010.925.000	APBD APBD		100% 100%	<b>2.554.535.500</b> 342.518.000 2.212.017.500
8	<b>Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan</b> 1 Reviu Atas Laporan Keuangan 2 Pemeriksaan Kinerja SKPD	Terjaminnya Laporan Keuangan sesuai SAP Jumlah Laporan Keuangan OPD yang direviu Jumlah OPD yang diperiksa kinerjanya	Samarinda Samarinda	17 Laporan 46 Laporan	<b>3.441.625.000</b> 226.500.000 3.215.125.000	APBD APBD		100% 100%	<b>3.785.787.500</b> 249.150.000 3.536.637.500
9	<b>Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b> 1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang dievaluasi	Prov/Kab/Kota	37 Laporan	<b>1.597.510.000</b> 1.597.510.000	APBD		100%	<b>1.757.261.000</b> 1.757.261.000
10	<b>Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</b> 1 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Jumlah kegiatan evaluasi berkala TLHP yang dilaksanakan	Prov/Kab/Kota	4 Kegiatan	<b>189.300.000</b> 189.300.000	APBD		100%	<b>208.230.000</b> 208.230.000
		<b>JUMLAH</b>			<b>16.042.840.000</b>				<b>19.010.264.000</b>